

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi pembangunan daerah adalah cita - cita dan citra masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Cita - cita dapat tercapai bilamana visi dan misi bukan *utopia*, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang dicita - citakan.

Strategi pembangunan daerah merupakan rumusan langkah - langkah strategis dengan mengoptimalkan potensi daerah dan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan internal dan tantangan eksternal pembangunan daerah untuk menjamin terlaksananya misi dan tercapainya visi pembangunan daerah. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada.

Berdasarkan tujuan dan sasaran - sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu - isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Barat 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Pembangunan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 - 2014

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kurang terintegrasinya keragaman agama, sosial budaya	1 Meningkatkan kesadaran dan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat	1 Pengembangan sistem pembinaan keagamaan yang terpadu dalam masyarakat	1 Mendorong fungsionalitas sistem pembinaan keagamaan yang terpadu.
		2. Revitalisasi peran lembaga sosial dan budaya dalam pembentukan karakter masyarakat	2. Mengaktualisasikan peran dan fungsi lembaga sosial dan budaya	2. Mendorong komunikasi antar lembaga sosial dan budaya dalam masyarakat multikultur
			3 Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah	3. Meningkatkan penguatan posisi, peran, dan fungsi lembaga sosial dan budaya dalam pembangunan
				4 Menggali dan mengembangkan seni dan budaya daerah



No	Issu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Terjadinya peningkatan gangguan social akibat kurangnya pemahaman demokratisasi, terkikisnya pertimbangan moral dan etika ditengah komponen masyarakat.	3. Optimalisasi fungsi keswadayaan dan kelembagaan masyarakat	4 Mendorong keswadayaan dan kelembagaan masyarakat	5 Meningkatkan fungsi keswadayaan dalam masyarakat
3	Kurang optimalnya pelayanan pendidikan masyarakat dan tingginya angka buta aksara	4. Revitalisasi dan mobilisasi peran kelembagaan lokal, keagamaan dan kepemudaan	5 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang efektif, efisiensi dan berkualitas	6 Mengoptimalkan pelayanan pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan adil terutama bagi masyarakat miski
			6. Pengembangan peran dan fungsi kelembagaan lokal dalam pendidikan masyarakat	7 Memperkuat fungsi dan profesionalitas lembaga lokal bidang pendidikan
				8 Memasyarakatkan olah raga dan pembangunan Kepemudaan
		5. Pengembangan pendidikan yang berkualitas dan profesional	7 Pengembangan sistem dan mekanisme pendidikan yang berkualitas	9 Meningkatkan pengembangan sistem dan mekanisme pendidikan yang berkualitas
4	Rendahnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.	6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	8. Peningkatan derajat kesehatan fisik dan mental masyarakat.	10 Meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan budaya hidup sehat
		7. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan Kesh. Ibu dan Anak (KIA)	9 Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA.	11 Mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan adil terutama bagi masyarakat miskin
		8. Optimalisasi peran lembaga-lembaga tradisional dalam akselerasi tingkat status gizi dan kesehatan Masyarakat	10 Peningkatan dan pembinaan peran lembaga tradisional dalam pengembangan kesehatan masyarakat	12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan Kesehatan Ibu
				13. Meningkatkan bentuk peranserta dan kualitas lembaga tradisional dalam akselerasi tingkat kesehatan dan sttus gizi masyarakat
5	Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan serta pengangguran.	9. Revitalisasi akselerasi pelayanan sosial dasar & akses terhadap sumberdaya ekonomi	11 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi.	14 Mendorong tumbuh kembangnya lembaga keuangan mikro, UMKM dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan



No	Issu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		10. Peningkatan pemerataan pendapatan	12 Pengembangan lapangan kerja baru	15 Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat – pusat ekonomi lokal
			14 Optimalisasi dan pengembangan sistem ketenagakerjaan	16. Meningkatkan kualitas penyediaan tenaga kerja
				17. Melakukan perbaikan regulasi ketenagakerjaan
6	Masih rendahnya daya tarik daerah bagi investor terutama sektor andalan.	12 Menciptakan iklim investasi yang kondusif	15 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	18. Memberikan kemudahan perijinan untuk investasi
		13 Meningkatkan percepatan pengembangan sektor pariwisata.	16. Optimalisasi potensi dan industri sektor pariwisata	19. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
				20 Melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan sektor pariwisata
7	Masih rendahnya produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas (meliputi peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan) serta rendahnya Nilai Tukar Petani / Nelayan.	14 Revitalisasi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan	17. Optimalisasi percepatan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan peningkatan pendapatan petani serta nelayan	21 Mendorong percepatan sistem pengelolaan sektor pertanian melalui jaminan pemasaran, revitalisasi regulasi, intensifikasi teknologi, dukungan permodalan, dan peningkatan pengetahuan petani/nelayan.
8	Rendahnya kemampuan Pelayanan Infrastruktur Daerah sehingga Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sector.	15 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar sector	18 Peningkatan harmonisasi perencanaan program spasial pembangunan	22 Mengembangkan pola keterpaduan antar wilayah dan antar sector.
				23 Meningkatkan penguatan fungsi dan ketersediaan tata ruang
		16 Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan wilayah yang diarahkan untuk mendukung keterpaduan dan pemerataan pengembangan wilayah	19 Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur strategis wilayah	24 Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan serta wilayah strategis lainnya
				25 Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan energi yang memadai dan berkelanjutan
		17 Meningkatkan penyediaan perumahan dan permukiman yang sehat	20 Optimalisasi penyediaan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman	26 Mendorong peningkatan sistem penyediaan perumahan untuk masyarakat
				27 Meningkatkan sistem penyediaan sanitasi dasar dan air baku yang memadai.



No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		18 Meningkatkan sinergitas sistem transportasi dan komunikasi wilayah	21 Optimalisasi sistem transportasi dan komunikasi wilayah	28 Meningkatkan percepatan sinergitas sistem transportasi inter dan intra wilayah 29 Meningkatkan sinergitas sistem komunikasi wilayah
9	Rendahnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta terjadinya peningkatan frekwensi bencana alam.	19 Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan IPTEK 20 Pengembangan penanggulangan resiko bencana	22 Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan dan pengelolaan SDA serta pengembangan IPTEK 23 Optimalisasi penanggulangan resiko bencana	30 Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem 31 Mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan. 32 Mendorong pengembangan dan pemanfaatan IPTEK. 33 Meningkatkan optimalisasi sistem, mekanisme, dan sinergitas pengelolaan penanggulangan bencana
10	Belum Terlaksananya tata Kelola Pemerintahan secara baik (Good Governance) dan Rendahnya penegakkan hukum.	21 Peningkatan kualitas penegakan hukum. 22 Optimalisasi Reformasi birokrasi	24 Optimalisasi koordinasi dan sinergitas penegakan hukum. 25 Deregulasi dan debirokratisasi penyelenggaraan pemerintahan	34 Meningkatkan komunikasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah 35 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum 36 Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah. 37 Mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten 38 Memantapkan pengelolaan keuangan daerah 39 Memantapkan sistem pengelolaan dan pengawasan administrasi pemerintahan.
11	Kurangnya partisipasi masy. dalam pembangunan dan terjadinya kesenjangan kesetaraan gender	23 Optimalisasi peran masyarakat dalam pembangunan 24 Terjaminnya keadilan gender dalam pembangunan dan politik	26 Penguatan sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif 27 Peningkatan kualitas perempuan dan kelembagaan pengarusutamaan gender atau anak	40 Meningkatkan peran, bentuk dan mekanisme sistem pembangunan partisipatif 41 Mengoptimalkan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan